

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pendidikan secara umum mempunyai arti suatu proses kehidupan dalam mengembangkan diri tiap individu untuk dapat melangsungkan kehidupan. Alpian et al:2019:67). Dengan kata lain, pendidikan menjadi sangat penting bagi setiap individu agar kualitas hidupnya meningkat. Namun demikian, proses pendidikan yang memerlukan biaya yang cukup besar seringkali menjadi kendala bagi satuan pendidikan. Permasalahan yang sering terjadi terkait biaya pendidikan di daerah perkotaan adalah tidak terjangkaunya pendidikan yang berkualitas oleh masyarakat menengah ke bawah dikarenakan mahalnya biaya pendidikan sedangkan permasalahan yang terjadi di daerah pelosok adalah kurangnya tenaga kependidikan dan fasilitas pendidikan (Sulfasyah dan Nur:2016:204). Oleh sebab itu, pemerintah berupaya agar dapat mengatasi masalah ini dengan mengeluarkan kebijakan dalam bidang pendidikan untuk membantu mengurangi beban biaya pendidikan. Salah satu bentuk kebijakan tersebut adalah Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang merupakan realisasi dalam perluasan dan pemerataan akses pendidikan, khususnya dalam mendukung program wajib belajar sembilan tahun, akan tetapi dalam pelaksanaannya terdapat banyak permasalahan dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah terutama pada jenjang Sekolah Dasar (Wardani et al:2019:34). Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya permasalahan dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) diantaranya adalah karena anggaran pendidikan yang cukup besar sehingga membuka peluang terjadinya korupsi. Selain itu, mental dari para pengelola pendidikan yang masih melakukan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme serta kurang maksimalnya kontrol masyarakat. Dengan permasalahan tersebut pemerintah membuat aturan-aturan untuk pengelolaan dana BOS berupa buku panduan BOS atau petunjuk teknis (juknis) untuk sekolah-sekolah yang menerimanya. Pengelolaan keuangan sekolah dalam penggunaan dana BOS menjadi tugas dan tanggungjawab yang dibebankan kepada tim manajemen BOS sekolah.

Pendidikan merupakan pondasi utama untuk membangun peradaban bangsa tak

terkecuali di negara Indonesia. Oleh karena itu, pendidikan menjadi perhatian yang sangat penting bagi para penyelenggara negara, seperti yang tercantum di dalam Undang-undang Dasar tahun 1945 pasal 31 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan dan wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional dengan memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Undang-undang no 20 tahun 2003 pasal 6 ayat 1 menyebutkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Selanjutnya pada pasal 34 menegaskan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. (Permendikbud 2015 : 1) Adapun upaya yang dilakukan Pemerintah dalam mewujudkannya adalah dengan memberikan bantuan dana pendidikan seperti PIP (Program Indonesia Pintar), KIP (Kartu Indonesia Pintar), dan lain-lain. Salah satu dari bantuan dana pendidikan yang diselenggarakan pemerintah dan mendapatkan alokasi dana yang cukup besar adalah program Dana Bantuan Operasional Sekolah.

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan program pemerintah yang pada dasarnya adalah penyediaan pendanaan biaya non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar (Permendikbud, 2015:2). Dengan kata lain, dana Bantuan Operasional Sekolah merupakan upaya pemerintah untuk meringankan biaya atau memberikan pendanaan pendidikan non personalia kepada siswa tidak mampu dan meringankan siswa lainnya sebagai pelaksana program wajib belajar serta perluasan akses untuk upaya peningkatan mutu pendidikan. Hal ini dikarenakan dana Bantuan Operasional Sekolah hampir seluruhnya bisa dimanfaatkan untuk biaya kegiatan siswa.

Tujuan bantuan operasional sekolah secara umum adalah untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka program wajib belajar 9 tahun yang bermutu serta berperan dalam mempercepat pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada sekolah-sekolah yang belum memenuhi SPM dan pencapaian

Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada sekolah-sekolah yang sudah memenuhi SPM.

Program BOS secara khusus bertujuan untuk membebaskan pungutan bagi seluruh peserta didik sekolah negeri terhadap biaya operasional sekolah, membebaskan pungutan bagi peserta didik miskin dari pungutan apapun serta meringankan beban biaya operasional sekolah bagi peserta didik di sekolah swasta (Permendikbud, 2015:3). Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis mutu pelayanan dasar pendidikan yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap peserta didik secara minimal (Permendikbud No 2 tahun 2018). Standar Nasional Pendidikan (SNP) adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Peraturan Pemerintah No 57 tahun 2021)

Menurut Undang-Undang no 20 tahun 2003 menyatakan bahwa pengelolaan dana pendidikan didasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas publik. Dengan demikian sekolah menempati posisi yang paling penting dalam keberhasilan program dana BOS karena dengan pengelolaan keuangan sekolah yang sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut maka diharapkan dana BOS akan dapat digunakan secara efektif dan efisien.

Beberapa hasil penelitian terdahulu yang melakukan penelitian yang sama tentang analisis pengelolaan dana BOS yaitu seperti yang dilakukan oleh Maknun (2018) dengan judul Penerapan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana BOS di SDN Tambakan Bangil tahun 2018 dengan hasil penelitian yang menyebutkan bahwa pengelolaan dana BOS di SDN Tambakan Bangil sudah berjalan cukup baik dengan bukti adanya beberapa tahapan yang sudah dilakukan oleh tim manajemen sekolah yang sesuai dengan prosedur yang berlaku. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Nuralisa (2019) dengan judul Pengelolaan Dana BOS pada SMP Negeri 9 Satu Atap Sendana Kabupaten Majene dengan hasil penelitian yang menyebutkan bahwa realisasi penggunaan dana BOS SMP Negeri Satu Atap Sendana sesuai dengan rencana anggaran dan telah dilaksanakan sesuai dengan baik dengan pemanfaatan dana yang cukup maksimal akan tetapi belum teratur dan proporsional. Penelitian lainnya dibuat oleh Aklima(2020) dengan judul Efektivitas pengelolaan Dana BOS di MIN 3 Banda Aceh. Adapun hasil penelitiannya menyebutkan bahwa efektivitas pengelolaan dana BOS di MIN 3 Banda Aceh dapat dikatakan cukup efektif akan tetapi penyaluran dana BOS yang

diberikan satu tahap dalam satu tahun menyebabkan hambatan dalam pengelolaan dana BOS itu sendiri.

Menurut Permendikbud (2015:3) disebutkan bahwa tujuan khusus dari dana Bantuan Operasional Sekolah adalah meringankan beban biaya operasional sekolah pada sekolah swasta. Definisi sekolah swasta adalah sekolah yang tidak dikelola oleh pemerintah daerah, negara bagian maupun nasional. Sekolah swasta melakukan pungutan biaya sekolah yang dibebankan kepada siswa untuk pendanaan biaya operasionalnya termasuk Sekolah Dasar Islam Terpadu Al Muqorrobin Depok. Sekolah yang menjadi obyek penelitian penulis ini adalah salah satu sekolah penerima Dana BOS reguler sejak tahun 2005 yang berstatus sekolah swasta. Dengan latar belakang tersebut, penulis ingin mengetahui bagaimana kontribusi dana Bantuan Operasional Sekolah dalam membantu operasional Sekolah Dasar Islam Terpadu Al Muqorrobin Depok. Penulis juga ingin mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan kesesuaian antara petunjuk teknis (juknis) Bantuan Operasional Sekolah dalam Permendikbud dengan realisasi pelaksanaan program dana BOS di sekolah tersebut. Permasalahan yang menjadi fokus penulis adalah hal-hal mengenai prosedur dan proses penerimaan penyaluran dana BOS dari pemerintah ke rekening sekolah, kemudian hal-hal tentang pengelolaan keuangan sampai dengan pelaporan Dana BOS baik secara *online* maupun pelaporan *offline*, oleh karena itulah penulis memilih judul :

“Analisis Sistem Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah di Sekolah Dasar Islam Terpadu Al Muqorrobin di Depok”.

1.2. Identifikasi Masalah

Permasalahan penelitian yang penulis ajukan dapat diidentifikasi permasalahannya sebagai berikut :

1. Realisasi penggunaan dana BOS seringkali tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis (Juknis) BOS Permendikbud.
2. Pengelolaan Keuangan dana BOS terkadang mengabaikan ketentuan- ketentuan yang terdapat dalam petunjuk teknis (Juknis) BOS dari Permendikbud.
3. Dalam pelaporan penggunaan dana BOS, terkadang tidak profesional, kurang transparan dan akuntabel.

1.3. Batasan Masalah

Menurut ada Undang-Undang no 31 tahun 2019 disebutkan ada 3 (tiga) jenis dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang disalurkan oleh pemerintah yaitu BOS Reguler yang biasanya diberikan atau dialokasikan untuk tujuan konsumsi menyangkut kebutuhan operasional sekolah, BOS Kinerja yaitu dana BOS yang diberikan kepada sekolah yang berkinerja baik dalam meningkatkan rapor mutu pendidikan agar mencapai standar nasional pendidikan sebagai apresiasi pemerintah terhadap sekolah-sekolah yang serius meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia, dan BOS Afirmasi yakni dana BOS yang diberikan kepada sekolah yang berada di daerah 3 T (tertinggal, tertular, transmigrasi). Penulis membatasi ruang lingkup penelitian hanya pada pengelolaan Dana BOS Reguler saja. Hal ini dikarenakan obyek penelitian yaitu Sekolah Dasar Islam Terpadu Al Muqorrobin Depok hanya menerima penyaluran jenis dana BOS Reguler.

Penelitian sebatas realisasi pengelolaan dana BOS Reguler sesuai petunjuk teknis (juknis) BOS dari Permendikbud. Di samping itu, dalam pengelolaan keuangan dan pelaporan, penulis memfokuskan diri hanya sebatas meneliti antara Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah (RKAS) dengan realisasi penggunaan dana BOS reguler, catatan terkait dengan transaksi, bukti transaksi, pembukuan transaksi sampai dengan pelaporan yang sesuai dengan format-format yang telah ditentukan. Penulis hanya meneliti hal-hal yang terkait dengan dana Bantuan Operasional Sekolah, pengelolaan keuangan sekolah di luar dana Bantuan Operasional Sekolah tidak akan dibahas.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Petunjuk Teknis (Juknis) BOS direalisasikan dalam pengelolaan Dana BOS di SDIT Al Muqorrobin Depok?
2. Bagaimana pengelolaan Dana BOS di SDIT Al Muqorrobin Depok?
3. Bagaimana pelaporan pengelolaan Dana BOS di SDIT Al Muqorrobin di Depok?

1.5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penelitian ini mempunyai beberapa

tujuan yang dapat penulis sampaikan sebagai berikut :

1. Menganalisis petunjuk teknis (juknis) BOS yang direalisasikan dalam pengelolaan Dana BOS di SDIT Al Muqorrobin Depok.
2. Menganalisis pengelolaan Dana BOS di SDIT Al Muqorrobin Depok.
3. Menganalisis pelaporan pengelolaan Dana BOS di SDIT Al Muqorrobin Depok.

1.6. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Pengelola Dana Bantuan Operasional Sekolah sekolah :
Memberikan pengetahuan tentang pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah yang benar.
2. Bagi Masyarakat
Memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa pengawasan terhadap pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah sangat penting bagi peningkatan mutu sekolah dan memberikan pengetahuan agar masyarakat mampu menganalisis apakah pengelolaan BOS sesuai dengan juknis BOS yang terdapat dalam Permendikbud.
3. Bagi Pemerintah
Memberikan referensi kepada pemerintah tentang pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah suatu sekolah dan memberikan masukan untuk peningkatan pengawasan pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah.
4. Bagi Penulis
Memberikan wawasan dan pengetahuan secara mendalam tentang pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah serta disiplin ilmu yang didapatkan dari bangku kuliah.

1.7. Sistematika Penulisan

Guna memahami lebih lanjut laporan ini, maka materi-materi yang tertera pada laporan skripsi ini dikelompokkan menjadi beberapa sub bab dengan sistematika penyampaian sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan uraian yang memuat tentang tinjauan pustaka terdahulu dan teori yang relevan dan terkait dengan tema metode penelitian.

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi tentang tempat dan waktu penelitian , jenis penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel dan teknis analisis data penelitian.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang gambaran obyek penelitian , hasil penelitian dan pembahasan secara lebih lengkap mengupas berbagai fenomena yang ada di dalam penelitian.

BAB V : SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan simpulan yang merupakan hasil akhir atas penelitian ini dan juga saran yang berisi masukan untuk pihak obyek penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

Berisi tentang berbagai buku , jurnal , rujukan yang secara sah digunakan dalam penyusunan penelitian ini.